

PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL, PELATIHAN, DAN INTENSITAS PERTEMUAN TERHADAP KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN

(THE INFLUENCE OF FORMAL EDUCATION, TRAINING, AND MEETING INTENSITY TO THE COMPETENCE OF AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION AGENT)

Oos M. Anwas
Pustekkom Kemdikbud
Jalan RE. Martadinata Ciputat Km 15,5 Tangerang Selatan, Banten
e-mail: oos.anwas@kemdikbud.go.id

Diterima tanggal: 3/11/2012; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 26/11/2012; Disetujui tanggal: 8/02/2013

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antarpenyuluh, dan kompetensi penyuluh pertanian; dan 2) pengaruh tingkat pendidikan formal, intensitas pelatihan, dan intensitas pertemuan antarpenyuluh terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. Penelitian menggunakan metode survei terhadap penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal rendah, intensitas pertemuan antarpenyuluh tinggi, intensitas pelatihan masih sangat rendah, dan kompetensi penyuluh pertanian rendah. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa intensitas pertemuan antarpenyuluh dan intensitas pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian, sedangkan tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh PNS tidak cukup signifikan berpengaruh dalam membentuk kompetensi penyuluh pertanian. Oleh karena itu, intensitas pertemuan antarpenyuluh dan intensitas pelatihan perlu ditingkatkan.

Kata kunci: pendidikan formal, intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antarpenyuluh, dan kompetensi penyuluh pertanian

Abstract: This research aimed to find out: 1) the level of formal education, training intensity, meeting intensity, and competence of extension education agent; and 2) the influence of the level of formal education, training intensity, meeting intensity, and competence of extension education agent to the enhancement of competence of the extension education agent. The research used survey method applied to public service extension education agents in Karawang District and Garut District, West Java. Descriptive and multiple regression analysis were used to proceed the data. The result of descriptive statistic analysis showed that the level of formal education was low, the intensity of meeting among the extension education agents mostly was high, the intensity of attended training was very low, and the competence of extension education agent was also low. The analysis of multiple regression showed that the intensity of meeting among the extension education agents and the intensity of training influenced significantly toward the competency of extension education agents, while the level of in-service formal education followed by public service extension education agents was not significant enough to influence their competency. For that reason the intensity of meeting and training should be enhanced.

Keywords: the formal education, the intensity of training, the intensity of meeting among extension education agents, the competency of agricultural extension education agent.

Pendahuluan

Penyuluhan (*extention education*) merupakan upaya untuk mengubah perilaku klien ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan (pendidikan nonformal) ini diperlukan dalam berbagai kehidupan masyarakat, mulai dari penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, keluarga berencana, hukum, pendidikan, dan aspek penyuluhan lainnya. Dalam perkembangannya, kegiatan penyuluhan terutama dalam penyuluhan pertanian mengalami berbagai tuntutan perubahan. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah) dan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Sistem otonomi daerah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, ternyata dalam realisasinya berakibat pada beragamnya penyuluhan pertanian di setiap kabupaten/kota. Realisasi penyuluhan tersebut sangat ditentukan oleh kebijakan dari pimpinan daerah. Dalam hal ini Sumardjo (2006) mengidentifikasi beberapa permasalahan penyuluhan di era otonomi daerah di antaranya: 1) adanya kesalahan persepsi bagi para penyelenggara penyuluhan di daerah; 2) citra penyuluhan dianggap masih kurang baik; 3) apriori di kalangan masyarakat tertentu terhadap penyuluhan; 4) di masa lalu penyuluhan terwarnai oleh muatan politik organisasi politik tertentu; dan 5) di era otonomi penyuluhan ditinggalkan oleh sebagian penguasa di daerah karena tidak jelas dan tidak tampak secara langsung.

Di sisi lain, profesionalisme tenaga penyuluh pertanian semakin dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Tenaga penyuluh merupakan ujung tombak pelaksanaan penyuluhan, karena berhadapan langsung dengan klien di lapangan. Tuntutan profesionalisme dan perubahan tersebut perlu dijawab dengan upaya meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian. Pergeseran pendekatan penyuluhan dari *top down* ke arah partisipatif dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk aktif seluas-luasnya dalam memecahkan masalah-masalah

yang dihadapi merupakan tantangan tersendiri bagi penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian diarahkan untuk memberdayakan petani yang diwujudkan dalam bentuk tingkat partisipasi (Anwas, 2011). Dalam realisasinya, menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat tidaklah mudah. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan diduga berkorelasi positif dengan kualitas penyuluh di lapangan.

Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kompetensi penyuluh seperti dilakukan Bambang Nuryanto (2008) dan Teddy Rachmat Mulyadi (2009) menunjukkan masih lemahnya kompetensi penyuluh pertanian. Rendahnya mutu tenaga penyuluh juga ditegaskan oleh Margono Slamet (2008) bahwa idealnya penyuluh lapangan itu juga profesional yang mampu berimprovisasi secara bertanggung jawab sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang dihadapi, namun tenaga-tenaga yang profesional semacam itu pada saat ini belum cukup tersedia. Kondisi ini mengindikasikan perlunya berbagai pihak untuk mengkaji bagaimana meningkatkan kualitas penyuluh.

Untuk meningkatkan kompetensi itu banyak upaya yang dapat dilakukan di antaranya melalui peningkatan pendidikan formal, pelatihan, pertemuan atau diskusi antarpenyuluh, menyediakan lahan/tempat uji coba inovasi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, dan kegiatan lainnya. Berdasarkan identifikasi tersebut, pendidikan formal yang diikuti setelah menjadi penyuluh pertanian, pelatihan, dan kegiatan pertemuan antarpenyuluh diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi penyuluh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel tersebut. Adapun masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana tingkat pendidikan formal lanjutan, intensitas pelatihan, dan intensitas pertemuan antarpenyuluh; dan 2) apakah tingkat pendidikan formal lanjutan, intensitas pelatihan, dan intensitas pertemuan antarpenyuluh berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh

setelah menjadi penyuluh PNS, intensitas pelatihan, intensitas pertemuan antarpenyuluh, dan kompetensi penyuluh pertanian; dan 2) pengaruh tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), intensitas pelatihan, dan intensitas pertemuan antarpenyuluh terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.

Kajian Literatur

Pendidikan Formal

Secara umum jalur pendidikan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Dalam perkembangannya, pendidikan formal tidak hanya dilaksanakan secara konvensional, tetapi dapat dilakukan dengan sistem jarak jauh, atau mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Manfaat mendayagunakan TIK dalam pendidikan formal ini memberikan banyak alternatif sumber belajar, mengatasi berbagai kendala komunikasi dalam sistem konvensional, serta dapat menciptakan peserta didik lebih aktif dan gairah untuk belajar. Menurut Anwas (2011) pendayagunaan TIK untuk pendidikan, khususnya pendidikan formal diperlukan empat aspek, yaitu mulai dari kebijakan pimpinan lembaga pendidikan, penyediaan infrastruktur, penyediaan dan akses konten TIK yang relevan, serta membangun sistem pemanfaatannya.

Pendidikan formal bagi penyuluh pertanian merupakan tuntutan profesi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Artinya mengikuti pendidikan formal ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilannya yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan sebagai penyuluh. Menurut Slamet (1992) dan Mardikanto (1993) bahwa tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi tingkat kompetensi individu. Hal

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim, dkk (2008) dalam menganalisis keterkaitan program pendidikan dan motivasi dengan pembentukan kompetensi guru di Korea. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara program pendidikan dan motivasi dalam pembentukan kompetensi guru di Korea. Kajian tersebut membuktikan bahwa mengikuti pendidikan formal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi. Oleh karena itu, pendidikan formal yang diikuti penyuluh pertanian diduga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensinya.

Pelatihan

Kompetensi Penyuluh Pertanian

Dalam pengembangan sumber daya manusia, pelatihan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai sesuai tuntutan perubahan zaman. Pelatihan menurut Bosker (1997) adalah suatu kegiatan pembelajaran yang terprogram dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta. Menurut Mondy dan Noe (1996), pelatihan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan sikap dalam rangka meningkatkan kinerja saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta sehingga kinerjanya dapat meningkat sesuai kebutuhan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi sistem pelatihan. Oleh karena itu, pelatihan dalam meningkatkan kemampuan penyuluh tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, akan tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pendayagunaan TIK untuk kegiatan pembelajaran atau pelatihan dapat dilakukan melalui *online*, *offline*, atau melalui teknologi penyiaran (Yuni Sugiarti, 2012). Metode dan materi pelatihan disesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan zaman yang dapat dilakukan melalui analisis kebutuhan di lapangan.

Penyuluh pertanian merupakan pekerjaan profesional yang bekerja pada organisasi formal. Menurut Mathis dan Jackson (2000), bekerja di dalam organisasi merupakan proses belajar yang

berkelanjutan, dan belajar sebagai jantung dari seluruh aktivitas pelatihan. Belajar di sini dilakukan dengan cara berbeda-beda bergantung pada pribadi yang bersangkutan. Hasil penelitian yang dilakukan Frisdiantara, dkk (2011) terhadap kompetensi manajerial Sarjana Akuntansi di Jakarta, Surabaya, dan Malang menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh secara signifikan dalam memperkuat kompetensi lulusan sarjana akuntansi. Penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan pelatihan merupakan variabel penting dalam membentuk kompetensi.

Pelatihan merupakan upaya meningkatkan diri, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika frekuensi pelatihan sering dilakukan, maka penyuluh mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan. Di sisi lain, mengikuti kegiatan pelatihan tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi penyuluh sangat dimungkinkan untuk mendapatkan aspek lain yang berguna untuk meningkatkan kemampuannya. Aspek lain tersebut di antaranya: berinteraksi dengan nara sumber (instruktur) pelatihan, berbagi (*sharing*) pengalaman dengan sesama penyuluh, memperoleh energi baru (motivasi) untuk belajar, serta informasi terbaru lainnya yang diperlukan dalam penyuluhan. Oleh karena itu, diduga bahwa semakin banyak intensitas kegiatan pelatihan yang diikuti penyuluh, maka kompetensinya juga meningkat. Dengan demikian, intensitas pelatihan yang diikuti penyuluh berpengaruh terhadap peningkatan kompetensinya.

Pertemuan Antarpenyuluh

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, menyebutkan bahwa di tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan. Salah satu fungsi dari Balai Penyuluhan adalah sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Begitu pula pada tingkat desa/kelurahan dibentuk Pos penyuluhan desa/kelurahan. Pos penyuluhan ini berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha di tingkat kelurahan atau desa.

Pertemuan antarpenyuluh merupakan pertemuan rutin yang dilakukan sebulan dua kali.

Tempat pertemuan dilaksanakan di tingkat kecamatan masing-masing atau dibagi dalam wilayah (beberapa kecamatan) atau kadang-kadang di tingkat kabupaten. Pertemuan antarpenyuluh baik di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan) atau di tingkat desa/kelurahan (Pos penyuluhan desa/kelurahan) penting bagi penyuluh sebagai wahana komunikasi dan tukar informasi khususnya antarpenyuluh. Dalam perspektif komunikasi massa, salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah kesenjangan pengetahuan yang semakin melebar (Severin dan Tankard, 2001). Upaya untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut menurut Viswanath (dalam Severin dan Tankard, 2001) adalah melalui kegiatan atau pertemuan kelompok dan segmentasi media yang sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, pertemuan antarpenyuluh ini adalah merupakan wahana komunikasi, berbagi pengalaman, serta wahana untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian yang dihadapi di tempat kerjanya masing-masing.

Dalam kajian ilmu komunikasi, pertemuan antarpenyuluh merupakan bentuk komunikasi interpersonal. Dalam pertemuan ini terjadi komunikasi antarpenyuluh, komunikasi penyuluh dengan pimpinan penyuluh, komunikasi penyuluh dengan nara sumber, bahkan terjadi pula komunikasi penyuluh dengan klien. Melalui wahana ini penyuluh dapat berbagi pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh pertanian. Oleh karena itu, kegiatan pertemuan antarpenyuluh diduga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.

Kompetensi Penyuluh

Konsep kompetensi mengacu pada pemikiran Boyatzis (1984), Spencer and Spencer (1993), Sumardjo, (2009), yang dapat disarikan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikapnya yang dituntut dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Ini berarti kompetensi penyuluh pertanian adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikap yang dituntut dalam melak-

sanakan tugasnya dalam memberdayakan petani (Anwas, 2011).

Berdasarkan kajian dari pemikiran beberapa pakar penyuluhan, diantaranya: Van den Ban dan Hawkins (1996), Asngari (2006). Sumardjo (1999), dan Slamet (1992), serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dapat dirumuskan tujuh dimensi kompetensi penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani. Adapun ketujuh dimensi kompetensi tersebut adalah: 1) Kompetensi Pemahaman Potensi Wilayah; 2) Kompetensi Komunikasi Inovasi; 3) Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran; 4) Kompetensi Pengelolaan Pembaharuan; 5) Kompetensi Pengelolaan Pelatihan; 6) Kompetensi Pengembangan Kewirausahaan; dan 7) Kompetensi Pemandu Sistem Jaringan (Anwas, 2009).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu *cross sectional survey* dimana pengumpulan data penelitian dilakukan pada saat yang bersamaan antara peubah X dengan Y. Variabel yang diteliti yaitu tingkat pendidikan formal (X1), intensitas pelatihan (X2), intensitas pertemuan antar-penyuluh (X3) dan kompetensi penyuluh pertanian (Y).

Definisi operasional dari variabel tingkat pendidikan formal adalah jenjang pendidikan formal (Diploma 1, Diploma 3, Sarjana/Diploma 4, Magister, dan Doktor) yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh PNS baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Intensitas pelatihan didefinisikan sebagai keseringan/frekuensi penyuluh mengikuti pelatihan dalam lima tahun terakhir sejak penelitian ini dilakukan. Intensitas pertemuan antarpenyuluh didefinisikan sebagai tingkat keseringan penyuluh dalam mengikuti pertemuan antarpenyuluh dalam tiga bulan terakhir sejak penelitian ini dilakukan. Kompetensi penyuluh pertanian adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikapnya dalam melaksanakan tugas penyuluhan dalam memberdayakan petani.

Populasi dalam penelitian ini yaitu penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil garapan padi di Kabupaten Karawang dan penyuluh garapan sayuran di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Sampel diambil secara random menggunakan teknik *random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Sevilla dkk., 1993) pada persen kelonggaran sebesar 7 persen. Hasil perhitungan dengan rumus Slovin tersebut, ditetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 170 orang, yang terdiri dari 80 orang penyuluh yang bertugas di pertanian padi dan 90 orang penyuluh yang bertugas di pertanian sayuran.

Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen yang diuji dalam penelitian ini yaitu validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*). Uji validitas konstruk dilakukan uji coba kuesioner terhadap sasaran yang relatif sama dengan objek penelitian. Uji coba ini dilakukan terhadap 30 penyuluh di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, skor tiap item dikorelasikan (*Korelasi Pearson Product Moment*) antara skor tes dengan skor kriteria. Uji reliabilitas instrumen diolah dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Instrumen penelitian berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas secara umum valid dan reliabel.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2009. Data yang dikumpulkan menggunakan beberapa cara, yaitu: pengamatan (*observation*), kuesioner (*questioner*), dan wawancara (*interview*). Data yang diperoleh dari lapangan melalui kuesioner merupakan data skala ordinal dengan simbol 1, 2, 3 dan 4. Untuk keperluan analisis statistik (statistik parametrik), dilakukan tranformasi data ke data interval. Dalam tranformasi indeks indikator, tiap indikator memiliki nilai 0 s.d 100. Nilai indeks terkecil 0 diberikan untuk jumlah skor terendah dan nilai 100 untuk jumlah skor tertinggi dari tiap indikator. Pembulatan angka menyesuaikan pembulatan dalam program komputer. Pengolahan data digunakan analisis kuantitatif dengan bantuan *software* aplikasi SPSS versi 17.

Untuk mendukung dan mempertajam analisis kuantitatif dilengkapi dengan informasi berdasarkan data kualitatif (Dey, 1993). Analisis kuantitatif menggunakan statistik yang meliputi: analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda (Kerlinger, 1993; Johnson dan Wichern, 2002). Analisis dekriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data tentang: tingkat pendidikan formal lanjutan (X1), intensitas pelatihan (X2),

intensitas pertemuan antarpenyuluh (X3), dan kompetensi penyuluh pertanian (Y). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh: tingkat pendidikan formal lanjutan (X1), intensitas pelatihan (X2), dan intensitas pertemuan antarpenyuluh (X3) terhadap peningkatan kompetensi penyuluh pertanian (Y).

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi Pendidikan Formal, Pelatihan, Intensitas Pertemuan, dan Kompetensi Penyuluh

Variabel penelitian yang diteliti berdasarkan hasil pengumpulan data yaitu tingkat pendidikan formal, intensitas mengikuti pertemuan antarpenyuluh, intensitas mengikuti pelatihan, dan kompetensi penyuluh dapat dideskripsikan dalam Tabel 1 (Anwas, 2009). Tingkat pendidikan formal yang dilakukan penyuluh cukup menyebar yaitu 34% dalam katagori sedang, 28% dalam katagori rendah, 21% sangat rendah, dan hanya 17% dalam katagori tinggi. Namun dari rata-rata skor sebesar 50, berada dalam katagori rendah (skor 26 s.d. 50).

Berdasarkan pendalaman di lapangan, keragaman dalam penyebaran tingkat pendidikan formal ini terkait dengan beragamnya kemampuan (terutama finansial) dan kesempatan penyuluh untuk mengikuti pendidikan formal. Kenyataannya untuk melanjutkan pendidikan formal seperti program beasiswa atau tugas belajar masih sangat terbatas. Biaya pendidikan formal lanjutan harus ditanggung oleh penyuluh yang bersangkutan. Hal ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan lembaga penyuluhan untuk

meningkatkan SDM penyuluh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.

Intensitas pertemuan antarpenyuluh (Tabel 1) sebagian besar (78%) dalam katagori tinggi. Begitupun rata-rata skor (sebesar 93) yaitu ada dalam katagori tinggi (skor 76 s.d. 100). Pertemuan antarpenyuluh ini merupakan pertemuan rutin yang dilakukan sebulan dua kali. Tempat pertemuan dilaksanakan di tingkat kecamatan masing-masing atau dibagi dalam wilayah (beberapa kecamatan) atau kadang-kadang di tingkat kabupaten. Pertemuan antarpenyuluh ini merupakan media belajar terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing penyuluh di lapangan. Pertemuan ini juga merupakan media untuk berbagi (*sharing*) pengalaman dan informasi atau temuan baru yang terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluhan.

Intensitas pelatihan yang diikuti penyuluh dalam lima tahun terakhir menunjukkan sebagian besar (71%) sangat rendah. Begitu pula rata-rata skor sebesar 20, berada dalam katagori sangat rendah (skor 0 s.d. 25). Ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan penyuluh dalam lima tahun terakhir sangat jarang. Hasil ini juga dapat ditafsirkan, bahwa perhatian pemerintah dan lembaga penyuluhan dalam peningkatan SDM penyuluh di tempat penelitian ini masih sangat rendah. Rendahnya intensitas pelatihan ini diduga berpengaruh terhadap kompetensi penyuluh.

Kompetensi penyuluh menunjukkan lebih dari setengahnya (64%) dalam katagori rendah. Begitu pula rata-rata skor berada dalam katagori rendah (skor 26 s.d. 50). Masih rendahnya kom-

Tabel 1. Sebaran Persentase dan Rata-rata Skor Tingkat Pendidikan Formal, Intensitas Pertemuan, Intensitas Pelatihan, dan Kompetensi Penyuluh

Variabel Katagori	Tingkat Pendidikan Formal		Intensitas Pertemuan		Intensitas Pelatihan		Kompetensi	
	%	Rata2 Skor	%	Rata2 Skor	%	Rata2 Skor	%	Rata2 Skor
Sangat Rendah	21		3		71	20	1	
Rendah	28	50	2		25		64	48
Sedang	34		18		2		35	
Tinggi	17		78	93	2		0	

Keterangan: 0 – 25 = Sangat rendah, 26 – 50 = Rendah, 51 – 75 = Sedang, 76 – 100 = Tinggi

petensi penyuluh tersebut diduga dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut yaitu tingkat pendidikan formal, intensitas mengikuti pertemuan antarpenyuluh, dan intensitas mengikuti pelatihan.

Pengaruh Pendidikan Formal, Pelatihan, dan Intensitas Pertemuan, terhadap Kompetensi Penyuluh

Variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kompetensi penyuluh pertanian dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan formal, intensitas mengikuti pertemuan antarpenyuluh, dan intensitas mengikuti pelatihan. Hasil uji regresi berganda diketahui (Tabel 2) bahwa yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kompetensi penyuluh yaitu: 1) intensitas pertemuan antarpenyuluh ($p=0,000$); dan 2) intensitas pelatihan ($p=0,000$), sedangkan tingkat pendidikan formal lanjutan terbukti tidak berpengaruh secara signifikan ($p=0,680$) (Anwas, 2009).

Intensitas pertemuan antarpenyuluh menunjukkan koefisien regresi nyata pada taraf kepercayaan 0,01. Artinya, pertemuan antarpenyuluh merupakan wahana yang berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh. Intensitas pertemuan antarpenyuluh yang dilakukan sebulan dua kali, sudah menjadi wahana mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, berbagi (*sharing*) pengalaman, wahana informasi inovasi/teknologi baru, serta sebagai media komunikasi antarpenyuluh dan juga penyuluh dengan pimpinan lembaga penyuluhan. Hasil pendalaman dengan beberapa penyuluh senior di lapangan, menjelaskan pentingnya pertemuan antarpenyuluh. Menurut mereka,

pertemuan antarpenyuluh merupakan pertemuan rutin di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dilakukan sebulan dua kali. Kadang-kadang dilakukan perwilayah atau di kabupaten. Pertemuan rutin ini merupakan sarana belajar. Penyuluh belajar mendalami materi dan membicarakan temuan-temuan di lapangan masing-masing. Penyuluh juga berbagi informasi inovasi-inovasi baru dan mendiskusikan permasalahan dari lapangan.

Dalam era informasi, setiap penyuluh tidak bisa lepas dari terpaan (*exposure*) media massa. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan inovasi dan teknologi pertanian seringkali diperoleh melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Para penyuluh walaupun profesinya sama, tetapi memiliki berbagai perbedaan karakteristik dan kemampuan dalam merespon terpaan media massa tersebut. Dalam perspektif komunikasi massa, kegiatan pertemuan dapat menjadi wahana pendalaman dan klarifikasi atas respon penyuluh yang relatif beragam terhadap terpaan media massa. Hal ini sejalan dengan teori Lazarsfeld yaitu teori komunikasi dua tahap (*two step flow*) (Sandjaja, dkk, 2004), teori Difusi Inovasi (Rogers, 1995) dan teori Kincaid dan Schramm (1987). Pendapat umum ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antarpribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain sekitarnya (Severin dan Tankard, 2001). Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan respon terhadap media massa atau pengetahuan tersebut menurut Viswanath (Severin dan Tankard, 2001) yaitu

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal, Intensitas Pertemuan, Intensitas Pelatihan terhadap Kompetensi Penyuluh

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.487	3.317		8.286	.000
	Pertemuan	.184	.036	.337	5.121	.000
	Pelatihan	.172	.030	.380	5.691	.000
	Pend.Formal	.009	.022	.027	.413	.680

a. *Dependent Variable:* Kompetensi

melalui kegiatan atau pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok atau pertemuan antar-penyuluh tersebut adalah kegiatan yang dapat menciptakan interaksi dan komunikasi, sehingga terjadi *sharing* pengetahuan dan pengalaman masing-masing.

Dalam pertemuan tidak hanya terjadi komunikasi formal saja, akan tetapi banyak terjadi komunikasi nonformal. Melalui komunikasi nonformal ini, antarpenyuluh, penyuluh dengan pimpinan lembaga penyuluhan, atau penyuluh dengan petani (klien) dapat saling tukar pengalaman serta menyampaikan keluhan dan kesulitan yang dihadapi mereka secara terbuka. Kondisi ini tentu saja secara langsung meningkatkan kesiapan dan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Untuk meningkatkan kualitas intensitas pertemuan, petani (kelompok tani) perlu dilibatkan. Salah satu prinsip penyuluhan menurut Dahama dan Bhatnagar (1980) bahwa penyuluhan harus menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan program penyuluhan (*principle of cooperation and participation*). Melibatkan kelompok tani dan tokoh masyarakat dapat berdiskusi secara langsung permasalahan yang dihadapi petani dan sekaligus mencari solusi yang tepat. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1996) bahwa petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program (penyuluhan) dan yang lebih penting lagi, petani akan termotivasi untuk bekerja sama dalam program penyuluhan jika ikut bertanggungjawab di dalamnya. Oleh karena itu, petani (terutama tokohnya) perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui kegiatan pertemuan antarpenyuluh tersebut.

Intensitas pelatihan merupakan variabel yang juga berpengaruh terhadap kompetensi penyuluh (Tabel 2). Ini bermakna bahwa intensitas pelatihan penyuluh berperan signifikan dalam meningkatkan kompetensi penyuluh. Pelatihan dalam penelitian ini, seperti dijelaskan dalam definisi operasional adalah keseringan atau intensitas penyuluh mengikuti pelatihan dalam lima tahun terakhir sejak penelitian ini dilakukan.

Jika frekuensi pelatihan sering dilakukan, maka penyuluh mendapatkan pengetahuan, sikap,

dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan. Di sisi lain, mengikuti kegiatan pelatihan tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi penyuluh sangat dimungkinkan untuk mendapatkan aspek lain yang berguna untuk meningkatkan kemampuannya. Aspek lain tersebut di antaranya: berinteraksi dengan nara sumber (instruktur) pelatihan, interaksi dengan sesama penyuluh, memperoleh energi baru (motivasi) untuk belajar, serta informasi terbaru lainnya yang diperlukan dalam penyuluhan. Rendahnya intensitas pelatihan (Tabel 1) ini mengakibatkan kompetensi penyuluh juga rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hafsah (2009) bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penyuluhan salah satunya adalah rendahnya SDM penyuluh sebagai akibat dari kurangnya frekuensi dan mutu pelatihan bagi penyuluh.

Rendahnya intensitas pelatihan (Tabel 1) ini menunjukkan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah masih lemah dalam meningkatkan kompetensi penyuluh. Padahal pendidikan dan latihan merupakan tanggungjawab Pemerintah seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 Pasal 21 Ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Ini berarti untuk meningkatkan kompetensi penyuluh, diperlukan komitmen pemerintah dalam peningkatan intensitas kegiatan pelatihan secara kontinyu sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Di sisi lain, peran swasta (dunia usaha) perlu dilibatkan untuk peduli terhadap peningkatan SDM penyuluh. Begitu pula organisasi profesi yang terkait dengan penyuluhan, perlu mengambil peran untuk meningkatkan SDM penyuluh termasuk mendorong pemerintah dan swasta agar peduli terhadap peningkatan SDM penyuluh sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Realitas bahwa intensitas pelatihan rendah, sedangkan tuntutan perubahan masyarakat terus meningkat, akibatnya kompetensi penyuluh juga rendah. Rendahnya intensitas pelatihan seringkali disebabkan oleh alasan klasik seperti keterbatasan dana dan alasan lainnya. Oleh karena itu, menurut Rosenberg (2001) bahwa dalam era perkembangan teknologi informasi dan komu-

nikasi, sistem pelatihan yang tradisional perlu diubah. Menurut Rosenberg (2001) ada lima macam perubahan pelatihan tersebut yaitu: 1) menekankan bukan pada proses tetapi pada *output* pelatihan yang memberikan efek positif bagi kinerja; 2) belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dengan kebutuhan dan kecepatan belajar yang fleksibel; 3) dari kertas ke *online*; 4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan; dan 5) materi pelatihan akan berganti cepat sesuai dengan kebutuhan sasaran yang nyata (*real*) dalam kehidupan. Ini berarti sistem pelatihan bagi penyuluh tidak bisa mengandalkan bentuk konvensional tatap muka biasa saja, akan tetapi perlu memanfaatkan berbagai media belajar. Dengan kata lain, sistem pelatihan yang masih konvensional perlu diubah dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dan informasi.

Keuntungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelatihan di antaranya: 1) penyuluh dibiasakan belajar dengan berbagai sumber sehingga di tempat tugasnya akan terbiasa untuk terus belajar melalui berbagai sumber; 2) mengurangi kesenjangan kualitas penyuluh di berbagai daerah; 3) dapat melibatkan peserta pelatihan (penyuluh) lebih besar; 4) penyuluh dapat mengikuti pelatihan tanpa harus meninggalkan tempat tugasnya; dan 5) biaya lebih efisien. Diklat Siaran Radio Pendidikan bagi Guru SD yang dilakukan Pustekkom Depdiknas merupakan salah satu contoh pemanfaatan berbagai media untuk meningkatkan SDM (Anwas, 2000). Oleh karena itu, pelatihan bagi penyuluh pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 3 berdasarkan nilai *R Square* diketahui sebesar 0,309. Artinya, kontribusi variabel intensitas pertemuan dan intensitas pelatihan terhadap kompetensi penyuluh sebesar 30,9%. Ini berarti masih terdapat sekitar 69,1% variabel lain

yang mempengaruhi kompetensi penyuluh di luar kedua variabel tersebut. Hal ini menjadi bahan kajian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam.

Variabel tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh nyata terhadap kompetensi penyuluh. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyadi (2009) dan Effendy (2009) yang melakukan penelitian kompetensi penyuluh pertanian di Jawa Barat bahwa tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh PNS tidak berpengaruh nyata terhadap kompetensi penyuluh. Bahwa kompleksitas pekerjaan penyuluhan pertanian tidak cukup terpenuhi oleh kemampuan yang dimiliki dari hasil pendidikan formal saja.

Penyuluh pertanian ketika diangkat menjadi penyuluh PNS yaitu lulus setingkat SLTA. Data kualitatif hasil pendalaman dengan beberapa penyuluh senior di lapangan menjelaskan tentang pengalaman melanjutkan pendidikan formal setingkat sarjana (S1) sebagai berikut: "Dorongan utama mengikuti pendidikan sampai sarjana, supaya bisa naik pangkat menjadi penyuluh ahli. Pengetahuan dan wawasan mungkin ada peningkatan, tetapi yang lebih terasa untuk melaksanakan tugas penyuluhan adalah pengalaman yang diperoleh di lapangan, terutama dalam melakukan uji coba atau memiliki lahan garapan. Manfaat yang paling dirasakan setelah lulus setingkat Sarjana adalah lebih percaya diri terutama dalam menghadapi kepala desa, camat, atau aparat pemerintah lainnya".

Informasi tersebut menunjukkan bahwa motivasi utama penyuluh dalam mengikuti pendidikan formal adalah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi penyuluh ahli dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian. Informasi hasil pendalaman di atas juga mengisyaratkan

Tabel 3. Kontribusi Variabel Intensitas Pertemuan dan Intensitas Pelatihan terhadap Kompetensi Penyuluh

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.556 ^a	.309	.296	8.11501

a. Predictors: (Constant), Pendlanjut, Pertemuan, Pelatihan

bahwa pendidikan formal yang menyiapkan tenaga penyuluh tersebut cenderung kurang relevan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga penyuluh merasakan pengalaman yang diperoleh di lapangan, terutama dalam melakukan uji coba atau memiliki garapan lebih bermanfaat dibandingkan dengan hasil pendidikan formal yang diikuti. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet (2009) bahwa kurikulum pendidikan tinggi selama ini barangkali yang banyak dibekalkan adalah pengetahuan (ilmu, teori, teknologi, filosofi, dsb) dan kurang aspek yang lain. Karena itu, belum mampu menumbuhkan kemampuan bertindak atau kompetensi tertentu. Pembaharuan kurikulum harus dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi sendiri dan selanjutnya perlu ditinjau kembali kemampuan-kemampuan dosennya.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh pertanian PNS dalam katagori rendah. Intensitas pertemuan antarpesyuluh dalam katagori tinggi, intensitas pelatihan yang diikuti penyuluh pertanian dalam lima tahun terakhir dalam katagori sangat rendah, sedangkan kompetensi penyuluh pertanian dalam katagori rendah.

Tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh setelah menjadi penyuluh PNS tidak cukup signifikan berpengaruh dalam membentuk kompetensi penyuluh pertanian. Intensitas mengikuti pertemuan antarpesyuluh yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian. Intensitas mengikuti pelatihan yang sangat rendah berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian yang juga rendah. Kontribusi variabel intensitas mengikuti pertemuan antarpesyuluh dan intensitas mengikuti pelatihan terhadap kompetensi penyuluh pertanian sebesar 30,9%. Ini berarti masih terdapat sekitar 69.1% variabel lain yang mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian di luar kedua variabel tersebut.

Saran

Pendidikan formal yang masih rendah dan belum cukup signifikan mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian sangat perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang terkait dengan penyuluh pertanian perlu melakukan pembenahan, mulai dari: seleksi calon peserta, pembenahan kurikulum yang sesuai kebutuhan klien, proses pembelajaran yang tidak sekedar teori tetapi juga praktik, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta memanfaatkan berbagai sumber belajar lainnya.

Intensitas pelatihan yang masih sangat rendah menyebabkan kompetensi penyuluh juga rendah. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pengelola penyuluh pertanian perlu meningkatkan intensitas dan kualitas pelatihan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui: meningkatkan frekuensi pelatihan, materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan klien/petani, proses pelatihan dilakukan secara interaktif, serta perlu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk lembaga pengelola penyuluh pertanian, pertemuan antarpesyuluh yang selama ini sudah berjalan sebulan dua kali perlu dipertahankan dan sekaligus kualitasnya ditingkatkan. Kegiatan pertemuan ini juga tidak hanya dilakukan dengan penyuluh saja, akan tetapi terjadi pertemuan penyuluh dengan berbagai pihak terkait, antara lain: petani, peneliti, pakar, pemerintah daerah, anggota dewan, dan pihak-pihak lainnya.

Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian/kajian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam dalam menemukan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap kompetensi penyuluh pertanian.

Pustaka Acuan

- Anwas, Oos M. 2000. Siaran Radio Pendidikan: Analisis Model Peningkatan Kualifikasi Guru SD. Jakarta: *Jurnal Teknodik*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anwas, Oos M. 2009. Pemanfaatan Media dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian. Disertasi: Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Pascasarjana IPB Bogor (tidak dipublikasikan).
- Anwas, Oos M. 2011. Kompetensi Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Petani. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*. Universitas Terbuka, Jakarta: Maret 2011.
- Asngari, Pang S. 2006. *Kumpulan Bahan Kuliah Prinsip-prinsip Penyuluhan*. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Sekolah Pascasarjana. Bogor: IPB. (tidak dipublikasikan).
- Boyatzis, RE. 1984. *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. New York: Jihn Willy & Sons.
- Bosker, J. 1997. *Training Effectiveness*, New York, Pergamon.
- Dahama, O.P. dan O.P. Bhatnagar. 1980. *Education and Communication for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Dey, Ian. 1993. *Qualitatif Data Analisis: A User Frienly Guide for Social Sientists*. New York: Routledge.
- Effendy, Lukman. 2009. *Kinerja Petani Pemandu dalam Pengembangan PHT dan Dampaknya pada Perilaku Petani di Jawa Barat*. Disertasi Pascasarjana IPB Bogor.
- Frisdiantara, Christea. Eka Afnan Troena. Armana Thoyib. dan Suhardjono. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kompetensi Manajerial; Studi pada Sarjana Akuntansi di Jakarta, Surabaya, dan Malang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Universitas Brawijaya. Volume 9 Nomor 2 Maret 2011.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2009. *Penguatan Peran PAPPI dalam Mendukung Tumbuh dan Berkembangnya Modal Sosial di Masyarakat*. Makalah Simposium dan Kongres Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI). Bogor, 24 s.d. 25 November 2009.
- Johnson, Richard A., dan Dean W. Wichern. 2002. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Fifth Edition. New Jersey: Pearson Education.
- Kerlinger, Fred N. 1993. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kincaid, D. Lawrence dan Wilbur Schramm. 1987. *Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia*. Edisi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Lim, Theo. Suah K, Ling L. Angela FL. and Si Via Chong. 2008. Motivation, Competence, and Comfidence to teach: An Exploratory Study of the Impact of an Initial Teacher Preparation (ITP) Programme on Beginning Primary School Teachers, *KJEP Journal*.
- Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2000. *Human Resource Management, 9-th edition*. South-Wetern College Publishing.
- Mondy, R. Wayne, dan Robert M. Noe. 1996. *Human Resource Management*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

- Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mulyadi, Teddy Rachmat. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya Pada Perilaku Petani Padi di Jawa Barat*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor.
- Nuryanto, Bambang Gatut. 2008. *Kompetensi Penyuluh dalam Pembangunan Pertanian di Propinsi Jawa Barat*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor.
- Rosenberg, Mj. 2001. *E-learning: Strategis for Delivering Knowledge in the Digital Age*. New York: McGraw-Hill.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of Innovations. Fourth Edition*. New York: The Free Press.
- Sevilla, C. G., J. A. Ochoa, T. G. Punsalan, B. P. Regala, dan G. G. Uriarte. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Spencer, M. Lyle dan M. Signe Spencer. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*, John Wiley & Son, Inc. New York, USA
- Severin, J. Werner dan James W. Tankard. 2001. *Communication Theory: Origin, Methods, and Uses in The Mass Media*. Eddison Wesley Lngman, Inc.
- Slamet, Margono. 1992. *Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas*. Diedit oleh: Aida V., Prabowo T., dan Wahyudi R. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Slamet, Margono. 2008. Menuju Pembangunan Berkelanjutan Melalui Implementasi UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Penyunting: Adjat Sudrajat dan Ida Yustina. Bogor: Sydex Plus.
- Slamet, Margono. 2009. *Perkembangan Penyuluhan Teori dan Praktek*. Bogor: Program Mayor Penyuluhan Pembangunan Departemen Komunikasi & Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, IPB <http://margonoipb.wordpress.com/category/makalah-makalah/penyuluhan-teori-dan-praktek/> (2 Agustus 2011)
- Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. *Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB*. Bogor.
- Sumardjo. 2006. *Kompetensi Penyuluh*. Makalah disampaikan pada Pertemuan KPPN dengan Departemen Pertanian di Batam pada April 2006.
- Sumardjo. 2008. Perlukah Stadarisasi Kompetensi. Makalah disajikan dalam Seminar Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB, 7 Juli 2008
- Sumardjo. 2009. Penyuluhan Pembangunan: Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat. Dalam *Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Penyunting: Adjat Sudrajat dan Ida Yustina. Bogor: Sydex Plus.
- Sandjaja, Sasa Djuarsa, dan Ilya Sumawinardi. 2004. *Teori Komunikasi; Materi Pokok Modul Universitas Terbuka*, Jakarta: UT.

- Sugiarti, Yuni. 2012. Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Artikel *Jurnal Teknodik* Vol. XVI No. 1 Maret 2012. Jakarta: Pustekkom Kemdikbud.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta: 2006.
- Van den Ban, A.W. dan H.S. Hawkins, 1996. *Agricultural Extension (second edition)*. Blackwell Science, Osney Mead, Oxford OX2 OEL.